

PERGULATAN TANPA UJUNG

Baru-baru ini terbit sebuah majalah yang diberi nama "ISLAMIA", sebuah majalah yang secara khusus mengulas tema-tema pemikiran dan peradaban Islam. Meski terlambat, *Tashwirul Afkar* sebagai jurnal yang mempunyai *concern* pada bidang yang sama, mengucapkan: Selamat!



Rumadi
Redaktur Jurnal
Tashwirul Afkar

Kehadiran majalah ini cukup menarik karena sejak awal ia memposisikan diri sebagai "benteng intelektual" sekaligus respon atas gerakan kelompok lain yang mengusung tema-tema liberalisasi dan kritik atas struktur pemikiran Islam. Tidak seperti *Sabili* misalnya, yang lebih menjual "amarah" atas munculnya gerakan Islam progressif, ISLAMIA lebih berwatak akademis. Hal ini antara lain dapat dilihat dari tema-tema yang diangkat serta gaya penulisannya yang cukup ketat dengan berbagai referensi. Majalah ini sebagian besar pengelolanya adalah putra-putra Indonesia yang sedang (dan telah) menempuh studi di Malaysia, terutama International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)-IIUM, Kuala Lumpur.

Barangkali inilah majalah ilmiah pertama yang secara *gentleman* memposisikan diri secara berhadapan dengan wacana keagamaan yang diangkat kelompok Islam progresif. Edisi perdana misalnya mengangkat tema "Hermeneutika versus

Tafsir al-Qur`an", yang secara khusus hadir untuk "membentengi al-Qur`an" dari serbuan pembacaan teks, termasuk teks suci (*al-nushûsh al-muqaddasah*), secara hermeneutis karena dianggap menggaganggu kesucian teks al-Qur`an yang diyakini berasal dari wahyu Tuhan baik

lafal maupun maknanya (*lafdhan wa ma`nan*).

Hermeneutika yang belakangan cukup mengemuka dalam studi al-Qur`an dipandang sebagai kelatahan intelektual yang dicurigai ada agenda "kelompok agama lain" untuk mendesakralisasi teks al-Qur`an. "Hermeneutika tidak cocok dipersandingkan dengan al-Qur`an karena ia berasal dari tradisi Bible yang mengandung sejumlah kelemahan", demikian kira-kira pesan utamanya. Namun demikian, meskipun menolak hermeneutika, secara tidak disadari sebenarnya mereka sedang mendemonstrasikan apa yang oleh Khaled Abu el-Fadl disebut sebagai "hermeneutika otoriter". Hermeneutika jenis ini selalu mengumandangkan penyamaan antara "maksud Tuhan" dengan "maksud pembaca/penafsir", dan memandang maksud tekstual dan otonomi teks sebagai hal yang bersifat sekunder. (Khaled Abu el-Fadl, *Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, [Jakarta: Serambi, 2004], h. 16)

Demikian juga edisi keduanya yang mengangkat tema "Studi Kritis Pemikiran: Arthur Jeffery, Arkoun, Nasr Hamid dan Abid al-Jabiri. Tokoh-tokoh ini sengaja diangkat karena merekalah yang selama ini dijadikan inspirasi dan rujukan kalangan progresif dalam melakukan studi kritis atas teks al-Qur'an. Dengan "merontokkan" argumentasi tokoh-tokoh tersebut diharapkan bisa mendelegitimasi gerakan pemikiran kritis studi al-Qur'an. Semangat tersebut tercermin dalam Rubrik "Pengantar" sebagai berikut:

"Telaah utama kali ini menghadirkan kepada pembaca studi kritis terhadap pemikiran-pemikiran beberapa tokoh cendekiawan yang selama ini dianggap memiliki pendekatan "baru" dan kritis terhadap kajian al-Qur'an dan bahkan kajian Islam secara umum.... Barangkali karena pemikir itu melontarkan pemikiran yang tidak pernah ada dalam tradisi intelektual Islam. Mungkin juga karena pemikiran mereka mengugat al-Qur'an dan tradisi keilmuan Islam yang mendukungnya, termasuk pemikiran ulama yang otoritatif di bidangnya.... Tidak menutup pula kemungkinan adanya motif-motif non-akademis, khususnya politik..."

Kutipan tersebut secara telanjang menunjukkan kegundahan atas munculnya arus studi al-Qur'an yang dicurigai sebagai infiltrasi kepada bangunan keilmuan Islam yang diwarisi beratus-ratus tahun nyaris tanpa kritik. Namun, satu hal yang agaknya dilupakan adalah bahwa dalam tradisi ilmiah, kritik adalah hal yang niscaya. Perkembangan ilmu pengetahuan antara lain adalah karena

adanya tradisi kritik ini. Karenanya, kritik atas sebuah teori tidak serta-merta "merontokkan" dan mendelegitimasi sebuah teori, tapi justru bisa menjadi energi untuk mengembangkan ilmu. Dengan demikian, kritisisme ilmiah seharusnya diletakkan dalam konteks pengembangan ilmu, bukan dengan spirit memusuhi, menegasi, dan mengubur.

Jika sikap terakhir ini yang diambil maka kita bisa terhindar dari jebakan otoritarianisme intelektual yang akan merampas dan menundukkan mekanisme pencarian kebenaran, terutama dalam pencarian makna sebuah teks, ke dalam pembacaan yang sangat subyektif. Otoritarianisme ini sangat berbahaya bila dia "berselingkuh" dengan kepentingan politik yang sangat potensial terjatuh pada *cleriko fasisme*.

Apa yang penulis uraikan di atas merupakan satu sudut pergulatan intelektual di tanah air yang sangat kaya spektrum. Memang, terkadang dalam berbagai spektrum tersebut terjadi benturan yang cukup tajam dan keras. Benturan-benturan itu hal yang sangat biasa dalam sejarah pemikiran Islam. Bahkan, kalau kita mau jujur pada sejarah, benturan-benturan pemikiran itulah yang justru menjadikan pemikiran Islam demikian kaya dan menjadi khazanah yang luar biasa. Itulah yang sebenarnya kita warisi!

Dalam perkembangannya, dinamika pemikiran tersebut berimpit dengan perkembangan sosial politik. Munculnya berbagai kelompok gerakan Islam radikal

dan juga partai politik Islam merupakan "metamorfosis" dalam bentuk lain dari gerakan intelektual yang begitu kritis terhadap pengaruh luar, Barat, namun tidak kritis dengan tradisinya sendiri. Padahal, setiap perkembangan sebuah tradisi tidak bisa dilepaskan dari berbagai pengaruh, baik dari Barat maupun Timur.

Munculnya partai-partai Islam sejak awal masa reformasi dan juga munculnya gerakan-gerakan Islam berwajah "sanggar" tidak bisa dilepaskan dari berbagai dinamika pemikiran tersebut. Terkait dengan ini, ada fenomena yang menarik yang patut kita cermati, yaitu semakin mengecilnya partai politik yang melakukan "politisasi agama". Isu agama dalam kampanye pemilu 2004 misalnya, tidak se-dahsyat dalam pemilu 1999. Elit politik, terutama elit parpol Islam, agaknya mulai mengurangi pernyataan yang dapat memancing emosi keberagamaan. Jika menjelang pemilu 1999 terjadi ketegangan antar pendukung parpol yang luar biasa, kini ketegangan itu mulai berkurang.

Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan mengapa isu agama agak berkurang dalam pemilu 2004. 1) Semakin berkurangnya jumlah partai berbasis agama, terutama partai Islam. Jika dalam pemilu 1999 tidak kurang 11 partai Islam menjadi

peserta pemilu, dalam pemilu 2004 tidak lebih dari enam parpol. Berkurangnya parpol berbasis agama tersebut tidak sepenuhnya bisa dikatakan telah terkon-solidasinya kekuatan partai Islam, tapi lebih karena ketidakmampuan aktivisnya untuk menggalang dukungan masyarakat. Akibatnya, beberapa parpol Islam tidak mampu lolos menjadi peserta pemilu



2004. 2) Meskipun dalam pemilu 1999 diikuti banyak partai Islam, baik yang menggunakan asas Islam maupun yang basis pendukungnya masyarakat Islam, namun jumlah perolehan suaranya tidak mencapai 50%, padahal jumlah pemeluk Islam konon mencapai 87 %. Kenyataan demikian bisa dimaknai bahwa sentimen dan isu-isu

keagamaan terbukti tidak cukup ampuh untuk menggalang dukungan masyarakat. Masyarakat juga semakin sadar bahwa pilihan politik tidak selalu dikaitkan dengan agama. Emosi keberagamaan yang terus diaduk-aduk menjelang pemilu 1999 lalu ternyata tidak sepenuhnya bisa mengubah perilaku pemilih. 3) Masyarakat sudah mulai sadar bahwa mereka selama ini telah menjadi korban dari kepentingan elit politik. Konflik berdarah-darah dalam pemilu 1999 lalu, ternyata tidak mempunyai arti apa-apa bagi kehidupan mereka, kecuali hanya

mengantarkan beberapa orang menduduki kursi legislatif. Oleh karena itu, mereka kini tidak mau lagi menjadi korban dan dipermainkan para elitnya.

Sebagaimana diketahui, perolehan suara partai-partai Islam dalam pemilu 2004 juga tidak terlalu signifikan. Meskipun sedikit mengalami kenaikan perolehan suara, namun partai Islam tetap tidak signifikan, kecuali kenaikan suara PKS yang menguasai parlemen di wilayah Jakarta. Satu hal yang perlu dicatat, dalam pemilu 2004, PKS tidak lagi menjual "syariat Islam", tapi lebih menjual "anti korupsi" dengan jargon "bersih dan peduli". Dengan demikian, isu-isu keagamaan seperti formalisasi syariat Islam, Piagam Jakarta dan sebagainya semakin terpinggirkan (paling tidak untuk sementara) dalam perpolitikan nasional.

Ilustrasi di atas sekadar ingin menggambarkan bahwa dinamika wacana pemikiran keagamaan akan selalu punya kaitan dengan dinamika politik, baik langsung maupun tidak. Tentu saja pergulatan ini akan terus berlanjut. Kita tentu tidak ingin, pergulatan ini berakhir pada "menang dan kalah", karena begitu kita menggunakan ukuran kalah-menang dalam dunia pemikiran berarti kita masih menggunakan ukuran "barbarisme" yang selalu mengandaikan adanya menang-kalah. Rivalitas tersebut, baik dalam pemikiran maupun gerakan sosial politik, harus tetap "dipelihara" untuk membentuk sebuah keseimbangan agar yang satu bisa memberi kontrol atas yang lain. Pergulatan memang tanpa ujung. Semoga! ❖

